PARTISIPASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI PROVINSI JAMBI

TESIS

Oleh:

A D A M

05202048

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PARTISIPASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKN LIAR DI PROVINSI JAMBI

Oleh: A d a m
No. BP. 05 202 048

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Afrizal, MA dan Drs. Bakaruddin Rosyidi Ahmad, MS)

Ringkasan

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 108 tahun 1999, luas hutan di Provinsi Jambi 2.179.440 Ha. Atau lebih kurang setara dengan 42,73 % dari luas daratan provinsi tersebut. Dari luasan tersebut, terdapat 4 Taman Nasional, yaitu Taman nasional Bukit Duabelas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Kerinci seblat, dan Taman Nasional Berbak.

Potensi kawasan hutan yang demikian luas, juga tidak terlepas dari ancaman pembalakan liar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menaggulangi pembalakan liar. Sejalan dengan berkembangnya demokrasi, demikian pula halnya dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OMS telah pula mengambil peran dengan berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar di Provinsi Jambi.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan partisipasi OMS dalam penaggulangan pembalakan liar di Provinsi Jambi, dan (2) memetakan rasionalisasi bentuk pilihan partisipasi yang dilakukan oleh OMS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, dengan memilih 5 OMS sebagi subjek penelitian, yaitu KKI-Warsi, AILInst, Pinse, YLBHL, dan NP Sand.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Dominasi paradigma lama yang menekankan pemaknaan desentralisasi sebagai proses pengalihan kekuasaan dan kewenangan yang ditandai oleh kombinasi sifat-sifat vertikal-ekslusif-tunggal mulai dipertukarkan dengan sifat-sifat horizontal-inklusif-ganda. Dalam paradigma lama, desentralisasi dirumuskan sebagai proses pemindahan yang berlangsung eksklusif dalam lingkup pemerintah karenanya bersifat vertikal dan hanya berlaku tunggal. Cara pandang yang disebut *intra-bureaucratic transfer of power and authority* ini mengakibatkan desentralisasi sepenuhnya menjadi persoalan yang dimonopoli pemerintah. Sebaliknya, paradigma baru memaknai desentralisasi sebagai proses ganda, berlangsung vertikal maupun horizontal, dan melewati batas-batas ranah pemerintahan.

Proses pertama adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses kedua adalah pemindahan *locus* politik dari ranah negara ke ranah non negara. Ranah non negara meliputi *civil society* dan *economic society*. Proses kedua ini berlangsung pada setiap lapis pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks Indonesia, pergeseran *locus* berlangsung pada level pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan desa. Pergeseran pengelolaan ini

menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralisitik dan memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Hal itu menghendaki masyarakat sipil memiliki peran yang penting untuk menyeimbangkan kekuatan antara sektor pemerintah dan swasta. Sudah menjadi pemahaman bersama jika selama pemerintahan Orde Baru masyarakat dijadikan objek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bukan sebagai subyek yang terlibat secara pro aktif. Masyarakat yang pro aktif ini dalam khazanah ilmu politik biasa disebut dengan *civil society* (masyarakat sipil).

Masyarakat sipil mensyaratkan adanya ruang publik yang bebas (*free public sphere*). Suatu wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum secara bebas dan terbuka. Masyarakat sipil direpresentasikan oleh berbagai jenis organisasi masyarakat sipil (OMS) baik melalui sistem *membership* ataupun tidak, di bidang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang bentuk partisipasi OMS di Provinsi Jambi dalam penanggulangan pembalakan liar. Selain itu juga diidentifikasi faktor-faktor penyebab atau rasionalisasi munculnya bentuk-bentuk partisipasi tersebut. Terakhir, penelitian ini menyimpulkan secara umum gerakan OMS di Jambi sebagai bagian dari gerakan sosial baru. Adapun penjabaran kesimpulan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bentuk partisipasi OMS, rasionalisasi bentuk partisipasi dan Partisipasi OMS sebagai bagian dari gerakan sosial baru

6.1.1 Bentuk Partisipasi OMS

Bentuk partisipasi OMS dalam penanggulangan pembalakan liar dilihat dari 3 sekmen yaitu deteksi, pencegahan dan pemberantasan. Sekmen deteksi memuat bentuk investigasi, monitoring, pengawasan administrasi/izin, dan membangun jaringan kerja. Sekmen pencegahan memuat bentuk partisipasi pengelolaan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, pengakuan hak kelola masyarakat, dan jaringan pencegahan. Sementara pemberantasan memuat partisipasi dalam bentuk pengawalan kasus, penghancuran barang bukti, P3KB kontrol, dan advokasi media massa. Skema ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

Model atau bentuk kegiatan OMS yang ada di Jambi umumnya difokuskan pada wilayah kawasan hutan dan penebangannya serta wilayah transportasi dan pemrosesan. KKI-Warsi, Pinse, YLBHL, AILInst, dan JKPKH cenderung bergiat di

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers

Best, Shaun "*Introduction To Politics And Society*", Sage Publication, printed by The Cromwell Press Ltd

Bruce, JW. 1998. Review of tenure terminology. Tenure Brief No. 1. University of Wisconsin-Madison. USA.

Cromwell E. 2002. Key Sheet for Pro-poor Infrastructure Provision: Land Tenure. Department for International Development. UK

Chandoke, Neera, 1995. *State and Civil Society: Explanations in Political Theory.* New Delhi: Sage Publication

Colfer, Carol J. Pierce dan Capistrano, Doris (Penyunting), Politik Desenralisasi, Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Jakarta, CIFOR, 2006

Considine, Mark,"*Public Policy: A Critical Approach*", MacMillan, Australia,1996

Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.* PSKK UGM Yogjakarta, 2003

Dwipayana, AAGN Ari, dan Ratnawati, 2006, *Modul Kuliah Teori Politik*, PLOD UGM.

Diamond, Lary. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation* (terjemahan). Yogja, Ire Press

Faisal, Sanapiah (2005). *Format-Format Peneltian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1996

FWI/GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia.* Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, dan Washington D.C: Global Forest Watch

Gaffar, Affan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil*, alih bahasa Ilyas Hasan. Jakarta: Mizan.